

Tanggal :14-06-2016 Waktu : 02:58:23, Url: <http://ppsstainmetro.ac.id/>

Oleh: Mufliha Wijayati,

Dosen Hukum Keluarga dan Pemerhati Kajian Gender STAIN Jurai Siwo Metro

SEJUMLAH riset tentang kesetaraan gender di dunia pendidikan dan pelaksanaan program pengarusutamaan gender (PUG) di Indonesia pada umumnya menegaskan bahwa Indonesia dinilai kurang berhasil menyosialisasikan kesetaraan gender. Susilaningih dan Agus Najib (2004) secara spesifik menegaskan bahwa membangun kesetaraan gender di perguruan tinggi bukanlah pekerjaan yang mudah. Mengubah persepsi yang buta gender, netral gender, atau mungkin bias gender menjadi persepsi yang sensitif gender, tentunya harus berhadapan dengan tantangan budaya, sistem akademik, dan juga birokrasi.

Isu Gender di Perguruan Tinggi

Isu gender dalam dunia pendidikan tinggi dapat dilihat dan rasakan pada ranah akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat (APKM) yang tidak setara dan tidak adil. Tingginya angka disparitas akses dan partisipasi peserta didik laki-laki dan perempuan dalam proses pendidikan serta pengembangan diri merupakan fakta penyelenggaraan pendidikan yang netral gender atau bahkan buta gender.

Positioning peran pengambil keputusan (kontrol) juga masih diwarnai dengan rendahnya pengakuan akan kapasitas dan kualitas kepemimpinan perempuan. Peran domestik perempuan sebagai ibu rumah tangga dan pengasuhan anak, sering menjadi alasan penghalang partisipasi perempuan dalam jajaran pengambil keputusan.

Isu gender lain di ranah kurikulum, proses pembelajaran, hubungan dan pergaulan sivitas akademika, serta sarana fasilitas pembelajaran sering mencerminkan kesenjangan dan bias gender yang sangat kuat. Penyediaan fasilitas umum dan tata ruang bangunan gedung, seperti tangga, toilet, ruang ibadah, ruang khusus laktasi, tempat penitipan anak, seyogianya memperhatikan dan mempertimbangkan kebutuhan khusus, tidak hanya bagi perempuan, tetapi juga bagi penyandang disabilitas dan orang tua. Berdasar hal di atas, kemauan dan komitmen yang tinggi adalah kepercayaannya untuk dapat membangun paradigma yang responsif sekaligus sensitif gender, di lingkungan perguruan tinggi Islam.

Membangun Budaya Responsif Gender di PTKI

Perguruan tinggi merupakan salah satu media vital untuk membangun budaya responsif gender. Hal ini karena eksistensi perguruan tinggi memainkan peran signifikan dalam membangun budaya dan kebudayaan. Ada beberapa landasan pemikiran mengapa perguruan tinggi harus dijadikan wahana utama dalam membangun budaya responsif gender ini.

Pertama, perguruan tinggi adalah belantara pengetahuan yang mempunyai tugas pokok mengkaji dan mentransformasikan pengetahuan serta mendesiminasikan ide-ide dan nilai baru pada masyarakat. Reproduksi pengetahuan, ideologi, dan doktrin dilakukan melalui kebijakan ataupun atmosfer akademik dan atmosfer kerja.

Kedua, pendidikan tinggi merupakan wadah institusional tempat semua sivitas akademika (laki-laki dan perempuan) mengekspresikan segala potensi, mengaktualisasikan, serta mendefinisikan identitas diri. Ketiga, strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan adalah paket kebijakan yang niscaya untuk diimplementasikan oleh institusi negara, termasuk pendidikan tinggi di bawah Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi juga Kementerian Agama.

PPRG adalah Sebuah Langkah Awal

Pengarusutamaan gender dalam pendidikan bukanlah sebuah program yang semata-mata ditambahkan secara khusus (add-on). Salah satu strategi pokok dan langkah pertama dalam membangun kesetaraan gender di lingkungan perguruan tinggi adalah menjadikan perspektif gender sebagai arus utama.

Strategi ini harus dilakukan pada semua lini dan tahapan penyelenggaraan pendidikan, mulai dari perencanaan, penganggaran, implementasi, evaluasi, dan monitoring program. Menjadikan perspektif gender sebagai arus utama dengan memperhatikan dan mempertimbangkan perbedaan, kebutuhan, pengalaman, dan aspirasi laki-laki juga perempuan (KPPPA: 2010).

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro sebagai salah satu perguruan tinggi keagamaan Islam di Lampung, di 2016, terpilih menjadi salah satu dari 12 PTKIN yang menjadi pilot project penguatan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) di lingkungan Kementerian Agama.

Program penguatan PPRG ini merupakan bentuk intervensi Kementerian Agama untuk membatalkan PUG dalam penyelenggaraan pendidikan, terutama pada ranah perencanaan kegiatan dan penganggarnya.

Terpilihnya STAIN Jurai Siwo Metro sebagai pilot project PPRG adalah peluang sekaligus tantangan yang harus dijawab dengan berbagai langkah nyata. Kepercayaan itu menjadi tanggung jawab manakala sebagai percontohan, STAIN Metro harus mampu mengemban amanat untuk menjadi motor penggerak sosialisasi, promosi, serta pendampingan proses perencanaan dan penganggaran responsif gender di lingkungan Kementerian Agama yang dimulakan dari institusi STAIN.

Political Will sebagai Prasyarat

Ciri utama dari PPRG adalah perencanaan dan penganggaran yang mempertimbangkan kebutuhan laki-laki dan perempuan, serta memberikan kebermanfaatn bagi keduanya pula. Harus dipahami bahwa gender tidak selalu identik dengan perempuan. Pada titik inilah political will dari pimpinan

sebagai kuasa pengambil keputusan menjadi niscaya untuk mengantarkan suksesnya program penguatan PPRG di STAIN Jurai Siwo Metro.

Kondisi objektif kepemimpinan STAIN Jurai Siwo Metro pada periode 2015-2019 didominasi oleh perempuan. Secara kuantitas, dari 33 posisi pimpinan, 17 di antaranya adalah perempuan yang menempati posisi strategis. Kondisi objektif ini, tentu saja adalah momentum untuk akselerasi penguatan PPRG di STAIN.

Pertanyaan yang muncul adalah apakah dominasi perempuan pada level pemegang kontrol menjadikan responsivitas dan sensitivitas gender otomatis melekat pada kebijakan dan program yang dilaksanakan. Tentu pertanyaan ini akan terjawab melalui aksi nyata dari penyelenggaraan program. Keinginan kuat dari pengampu kebijakan menjadi tidak bermakna tanpa didukung infrastruktur, focal point, dan partisipasi semua pihak, serta budaya akademik dan budaya kerja di STAIN Jurai siwo Metro.

Adanya political will ini akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang konstruktif dalam membangun budaya responsif gender. Bila prasyarat ini sudah terpenuhi, pilot project ini akan berjalan secara terkonsep, sistematis, dan kontinu.

Keberhasilan STAIN Metro menjadi pilot project PPRG di Kementerian Agama akan berdampak pada meningkatnya daya saing STAIN Metro yang sedang menapaki tahap akhir transformasi menjadi IAIN. Muara dari program ini adalah terwujudnya proses penyelenggaraan pendidikan tinggi yang adil gender dengan menghilangkan atau paling tidak meminimalisasi kesenjangan dan ketidakadilan gender di dunia pendidikan. Dalam lingkup kedaerahan, keberhasilan ini tentu akan memperkuat citra Kota Metro sebagai kota pendidikan yang ramah gender. Semoga! n
Pernah terbit di Lampungpost 11 Mei 2016

<http://lampost.co/berita/membangun-budaya-responsif-gender-di-ptki >